

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

PERKEMBANGAN INDEKS HARGA KONSUMEN/INFLASI KABUPATEN KUDUS TRIWULAN II TAHUN 2026

A. BULAN APRIL 2026 INFLASI 0,02%

1. Pada bulan April 2026 Kabupaten Kudus mengalami inflasi year on year (y-on-y) sebesar 1,90% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,01. Tingkat inflasi month to month (m-to-m) bulan April 2026 sebesar 0,02% dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) sebesar 0,96%.
2. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa kelompok indeks pengeluaran yaitu: kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 1,06%, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,94%, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,57%, kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,50%, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,33%, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,29%, kelompok kesehatan sebesar 0,17% dan kelompok pendidikan sebesar 0,11%.
3. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,33%, kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,47% dan kelompok transportasi sebesar 0,13%.
4. Nasional pada bulan April 2026 mengalami inflasi y-on-y sebesar 2,42%, inflasi m-to-m sebesar 0,13% dan inflasi y-to-d sebesar 1,06%. Jawa Tengah mengalami inflasi y-on-y sebesar 2,11%, deflasi m-to-m sebesar 0,03% dan inflasi y-to-d sebesar 0,95%.
5. Inflasi di Jawa Tengah terjadi di dua kota SBH yaitu Kabupaten Kudus sebesar 0,02% dan Kota Semarang sebesar 0,17%, tujuh kabupaten/kota lainnya mengalami deflasi.

B. BULAN MEI 2026 INFLASI 0,31%

1. Pada bulan Mei 2026 Kabupaten Kudus mengalami inflasi year on year (y-on-y) sebesar 2,67% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,35. Tingkat inflasi month to month (m-to-m) bulan Mei 2026 sebesar 0,31% dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) sebesar 1,27%.
2. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa kelompok indeks pengeluaran yaitu: kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 1,09%, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,82%, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,67%, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,56%, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,36%, kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,28%, kelompok transportasi sebesar 0,23%, kelompok kesehatan sebesar 0,22% dan kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,13%.
3. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks adalah kelompok kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,38%.
4. Nasional pada bulan Mei 2026 mengalami inflasi y-on-y sebesar 3,08%, inflasi m-to-m sebesar 0,28% dan inflasi y-to-d sebesar 1,35%. Jawa Tengah mengalami inflasi y-on-y sebesar 2,85%, inflasi m-to-m sebesar 0,23% dan inflasi y-to-d sebesar 1,19%.

Inflasi di Jawa Tengah terjadi di sembilan kota SBH, inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kudus, Kota Surakarta dan Kabupaten Cilacap sebesar 0,31% dan inflasi terendah terjadi di Kabupaten Wonosobo sebesar 0,12%.

C. BULAN JUNI 2026 INFLASI 0,29%

1. Pada bulan Juni 2026 Kabupaten Kudus Juni 2026 mengalami inflasi year on year (y-on-y) sebesar 2,83% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,67. Tingkat inflasi month to month (m-to-m) bulan Mei 2026 sebesar 0,29% dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) sebesar 1,56%.
2. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa kelompok indeks pengeluaran yaitu: kelompok transportasi sebesar 1,87%, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,45%, kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,41%, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,28%, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,21%, kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,21%, kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,07% dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,07%.
3. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau .sebesar 0,20% dan kelompok kesehatan sebesar 0,02%.
4. Nasional pada bulan Juni 2026 mengalami inflasi y-on-y sebesar 3,34%, inflasi m-to-m sebesar 0,44% dan inflasi y-to-d sebesar 1,79%. Jawa Tengah mengalami inflasi y-on-y sebesar 2,92%, inflasi m-to-m sebesar 0,31% dan inflasi y-to-d sebesar 1,51%.
5. Inflasi di Jawa Tengah terjadi di sembilan kota SBH, inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Wonogiri sebesar 0,44% dan inflasi terendah terjadi di Cilacap sebesar 0,10%.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENGENDALIAN INFLASI KABUPATEN KUDUS TRIWULAN II TAHUN 2026

Komoditas yang memberikan sumbangan terbesar terhadap inflasi di Kabupaten Kudus pada Triwulan II Tahun 2026 adalah :

1. Bensin
2. Bawang merah
3. Telepon seluler
4. Cabai merah
5. Laptop/notebook

Penyesuaian harga bensin menjadi penyumbang inflasi tertinggi dikarenakan harga minyak mentah dunia melonjak akibat ketegangan geopolitik internasional serta nilai tukar rupiah terhadap dolar melemah.

Bawang merah dan cabai merah merupakan komoditas yang selalu sensitif terhadap terhadap cuaca dan pasokan. Kenaikan harga barang-barang elektronik pada telepon seluler dan laptop/notebook dipengaruhi oleh pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS atau

kenaikan biaya komponen global.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI KABUPATEN KUDUS TRIWULAN II TAHUN 2026

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kudus pada Triwulan II Tahun 2026 ini antara lain:

1. Menginformasikan sumber dan potensi tekanan inflasi melalui siaran pers yang dilaksanakan oleh BPS Kabupaten Kudus setiap bulan.
2. Melakukan analisa sumber dan potensi tekanan inflasi yang terjadi pada bulan sebelumnya dan upaya pengendalian inflasi pada bulan berjalan dengan Rekomendasi Ketua TPID kepada anggota TPID agar melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk pengendalian inflasi.
3. Melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya, serta jasa melalui survei perkembangan harga yang dilakukan setiap harinya oleh Dinas Perdagangan.
4. Melaksanakan survei harga bersama-sama antara Tim Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus dengan Tim BPS Kabupaten Kudus guna sinkronisasi harga yang ada di pasaran.
5. Melakukan pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya di Kabupaten Kudus yang dilakukan secara rutin oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus.
6. Melakukan pengawasan harga dan ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok yang bersifat strategis terhadap kebutuhan masyarakat yang dilakukan secara insidental oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Kudus.
7. Menyusun kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Kudus dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi di Provinsi Jawa Tengah.
8. Melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik di Kabupaten Kudus yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan. Dengan penyediaan dan penyaluran bahan pangan pokok atau pangan lainnya, pengelolaan cadangan pangan dan panganekaragaman pangan.
9. Melakukan pengawasan kondisi kelancaran lalu lintas dan melakukan manajemen lalu lintas dalam rangka memperlancar distribusi barang dan jasa di Kabupaten Kudus yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
10. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah kepada Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

EVALUASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI KABUPATEN KUDUS TRIWULAN II TAHUN 2026

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi Triwulan II Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan program ketahanan pangan di Kabupaten Kudus.

- Pemantauan harga kebutuhan pokok masyarakat yang dilaksanakan setiap hari.
3. Monitoring distribusi barang strategis kebutuhan pokok masyarakat.
 4. Analisa sumber atau potensi tekanan inflasi yang dilakukan setiap bulan.
 5. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian.
 6. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur jalan dan jembatan Kabupaten.
 7. Rehabilitasi pasar-pasar tradisional.
5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

REKOMENDASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI KABUPATEN KUDUS TRIWULAN II TAHUN 2026

A. Dinas Perdagangan:

1. agar melaksanakan pengawasan distribusi dan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya di Kabupaten Kudus, terutama untuk komoditas minyak goreng bersubsidi;
2. agar melakukan pemantauan dan pencatatan harian terhadap harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dalam rangka mitigasi lonjakan harga pangan;
3. melakukan pengawasan stok dan pasokan dari tingkat distributor hingga pedagang eceran guna mencegah kelangkaan barang;
4. melaksanakan pemantauan dan pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di Kabupaten Kudus serta melaporkan pada aplikasi SP2P Kemendag;
5. melakukan percepatan pelaksanaan upaya peningkatan infrastruktur perdagangan.

B. Dinas Pertanian dan Pangan:

1. agar meningkatkan pengawasan terhadap kesehatan hewan ternak yang masuk di Kabupaten Kudus utamanya kambing, sapi dan kerbau menjelang Hari Raya Idul Adha Tahun 2026;
2. meningkatkan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam rangka penyediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya;
3. melaksanakan pemantauan ketersediaan dan kebutuhan pangan di Kabupaten Kudus;
4. melaksanakan optimalisasi kerja sama antar daerah dengan daerah penghasil;
5. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketersediaan stok pangan di Kabupaten Kudus;
6. melakukan pendampingan kepada petani pada musim kemarau ini sehingga tidak ada kendala dalam pemenuhan kebutuhan benih, pupuk dan irigasi.

C. Seluruh Anggota TPID

Seluruh anggota TPID agar turut serta menjaga pengendalian inflasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.